



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-24/PJ/2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN REKOMENDASI
TERKAIT AKSES KEPABEANAN

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-24/PJ/2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
REKOMENDASI TERKAIT AKSES KEPABEANAN

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN REKOMENDASI KEMBALI REGISTRASI KEPABEANAN

Nomor: (1)
Lampiran : (2)
Hal : Permintaan Rekomendasi Pengajuan Kembali
Registrasi Kepabeanan

Yth, Kepala Kantor Pelayanan Pajak(3)/Direktur Intelijen Perpajakan*
.....(4)

Dengan ini, saya:
Nama :(5)
NPWP : (6)
Alamat : (7)
Jabatan : (8)
NIK/Nomor Paspor* :(9)

bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/wakil dari (hanya diisi dalam hal Wajib Pajak Badan):
Nama Wajib Pajak. :(10)
NPWP : (11)
Alamat :(12)

mengajukan permintaan rekomendasi dalam rangka pengajuan kembali Registrasi Kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehubungan pencabutan Akses Kepabeanan Wajib Pajak karena: (13)

- ☐ tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan selama 2 (dua) tahun terakhir dan / atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai selama 3 (tiga) masa pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban;
- ☐ tidak melunasi utang pajak termasuk biaya penagihan pajak yang telah dilakukan kegiatan penagihan pajak; dan/atau
- ☐ sertifikat elektronik Wajib Pajak telah dilakukan pencabutan.

berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Terkait Akses Kepabeanan dan perubahannya. Sebagai bahan pertimbangan, dalam surat ini kami lampirkan juga dokumen sebagai berikut:
1(14)
2.....dst.

Demikian disampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

.....(15)
Pemohon,

.....(16)

*) Coret yang tidak perlu

**PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN REKOMENDASI KEMBALI
REGISTRASI KEPABEANAN**

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permintaan.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permintaan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama unit KPP yang dituju.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat unit KPP yang dituju.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama wakil/kuasa yang menandatangani surat permintaan.
- Nomor (6) : Diisi dengan NPWP wakil/kuasa yang menandatangani surat permintaan.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat wakil/kuasa yang menandatangani surat permintaan.
- Nomor (8) : Diisi dengan jabatan wakil/kuasa yang menandatangani surat permintaan.
- Nomor (9) : Diisi dengan NIK/nomor paspor wakil/kuasa yang menandatangani surat permintaan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak badan yang diwakilkan/dikuasakan.
- Nomor (11) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak badan yang diwakilkan/dikuasakan.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak badan yang diwakilkan /dikuasakan.
- Nomor (13) : Pilih salah satu/lebih kriteria dengan tanda centang (✓).
- Nomor (14) : Diisi dengan jenis dokumen yang dilampirkan.
- Nomor (15) : Diisi dengan kota, tanggal, bulan dan tahun surat permintaan ditandatangani.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama dan tanda tangan wakil/kuasa.

B. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERIAN REKOMENDASI KEMBALI REGISTRASI KEPABEANAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....

Nomor : S-.....(1)(2)
Hal : Pemberian Rekomendasi Dalam Rangka
Pengajuan Kembali Registrasi Kepabeanan

Yth(3)
.....(4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(5) tanggal(6) yang diterima tanggal(7) hal Permintaan Rekomendasi Pengajuan Kembali Registrasi Kepabeanan, dengan ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, permintaan Saudara telah memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan/atau Pasal 4 ayat (1) dan/atau Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2017.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami setuju untuk memberikan rekomendasi dalam rangka pengajuan kembali Registrasi Kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Kepala Kantor / Direktur*,

.....(8)
NIP.....(9)

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak

*)Coret yang tidak perlu

**PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PEMBERIAN REKOMENDASI KEMBALI
REGISTRASI KEPABEANAN**

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat jawaban pemberian rekomendasi.
- Nomor (2) : Diisi dengan tanggal surat jawaban pemberian rekomendasi.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan rekomendasi.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diberikan rekomendasi.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permintaan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permintaan Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal diterimanya surat permintaan Wajib Pajak di KPP/Direktorat Intelijen Perpajakan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani surat pemberian rekomendasi.
- Nomor (9) : Diisi dengan NIP pejabat yang mendatangi surat pemberian rekomendasi.

C. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMINTAAN REKOMENDASI KEMBALI REGISTRASI KEPABEANAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....

Nomor : S-.....(1)(2)
Hal : Penolakan Permintaan Rekomendasi
Pengajuan Kembali Registrasi Kepabeanan

Yth(3)
.....(4)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor(5) tanggal(6) yang diterima tanggal (7) hal Permintaan Rekomendasi Pengajuan Kembali Registrasi Kepabeanan, dengan ini disampaikan bahwa:

- Berdasarkan penelitian kami, permintaan Saudara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan/atau Pasal 4 ayat (1) dan/atau Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2017 dengan alasan sebagai berikut: (8)
☐ tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan selama 2 (dua) tahun terakhir dan/atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai selama 3 (tiga) masa pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban;
☐ tidak melunasi utang pajak termasuk biaya penagihan pajak yang telah dilakukan kegiatan penagihan pajak; dan/atau
☐ sertifikat elektronik Wajib Pajak telah dilakukan pencabutan.
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami menolak permintaan rekomendasi Saudara dan menghimbau Saudara untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut di atas sebelum mengajukan permintaan rekomendasi kembali sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2017.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Kepala Kantor / Direktur*,

.....(9)
NIP.....(10)

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak

*)Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMINTAAN REKOMENDASI
KEMBALI REGISTRASI KEPABEANAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat penolakan permintaan rekomendasi.
- Nomor (2) : Diisi dengan tanggal surat penolakan permintaan rekomendasi.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan penolakan permintaan rekomendasi.
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diberikan penolakan permintaan rekomendasi.
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permintaan Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permintaan Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal diterimanya surat permintaan Wajib Pajak di KPP/Direktorat Intelijen Perpajakan.
- Nomor (8) : Pilih salah satu/lebih kriteria dengan tanda centang (√),
- Nomor (9) : Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani surat penolakan permintaan rekomendasi.
- Nomor (10) : Diisi dengan NIP pejabat yang menandatangani surat penolakan permintaan rekomendasi.
-

DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd
KEN DWIJUGIASTEADI